

Penanggulangan Kemiskinan Pasca Bencana Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Pada Perempuan

Oleh

Sukiyani

ABSTRAK

Upaya penanggulangan kemiskinan pasca terjadinya bencana alam kepada masyarakat yang terdampak dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pada perempuan salah satunya melalui kegiatan yang di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) yaitu program Desa Prima. Tujuan dari Desa Prima untuk memajukan ekonomi perempuan, apabila kondisi ekonomi pada keluarga baik maka akan dapat terpenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan gizi. Perempuan merupakan potensi dan asset bagi pembangunan. Desa Prima merupakan program bantuan kepada perempuan miskin dengan memberikan kesempatan untuk berwirausaha, berinovasi, dan berkreasi dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Kata Kunci: Pasca Bencana, Desa Prima, DIY, Perempuan

ABSTRACT

Efforts to reduce poverty after the occurrence of natural disasters to affected communities can be carried out by empowering and developing economics for women, one of which is through activities initiated by the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Population Control in the Special Region of Yogyakarta (DP3AP2 DIY), namely the Prima Village program. The purpose of Prima Village is to advance the women's economy, if the economic conditions in the family are good, the family's needs will be fulfilled, including the needs of education, health and nutrition. Women are potential and assets for development. Prima Village is an assistance program for poor women by providing opportunities for entrepreneurship, innovation, and creativity by utilizing local wisdom.

Keywords: Post-Disaster, Prima Village, DIY, Women

A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Pada tahun 2021, telah terjadi bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.045 kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 5 April 2021. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), erupsi gunung Merapi, banjir, gempa bumi, kekeringan, hingga tanah longsor. Bencana alam tersebut menyebabkan 4.362.537 orang mengungsi, 337 jiwa meninggal dunia, 12.463 luka-luka dan 55 orang hilang.

Pasca terjadinya bencana alam akan berdampak buruk bagi kehidupan warga salahsatunya yaitu angka kemiskinan meningkat dikarenakan warga kehilangan modal hidup, baik uang, harta, tempat tinggal dan berakibat mengurangi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika pemerintah tidak melakukan penanganan terhadap kemiskinan tersebut, maka angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Kemiskinan menyebabkan kualitas kesehatan menjadi rendah, selanjutnya kesehatan yang rendah mengakibatkan mobilitas dan aktivitas menjadi rendah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun tingkat produktivitasnya. Aktivitas ekonomi dan tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan pendidikan menjadi rendah karena terbatasnya biaya yang tersedia untuk pendidikan. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya tindak kekerasan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab menjamin kehidupan rakyatnya, termasuk kehidupan warga terdampak pada saat pasca bencana alam. Salah satu upaya perlindungan negara kepada warga pasca terjadinya bencana alam untuk menanggulangi kemiskinan dapat melalui program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pada perempuan.

Eksistensi perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, yang berperan penting dalam mengelola keuangan keluarga sehingga dapat menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Perempuan mampu mendayagunakan kemampuan yang dimilikinya dalam lingkungan sosial untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Desa Prima adalah desa yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

B. Tujuan dan Sasaran Program Desa Prima

Tujuan umum dari program Desa Prima adalah Mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan

yang lebih sehat dan sejahtera baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa.

Tujuan khusus dari program Desa Prima adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Indonesia di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan lainnya.
2. Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif.
3. Memperkuat bargaining position kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi

Sasaran dari program Desa Prima adalah terbentuknya Kelompok Perempuan Produktif sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi kaum perempuan miskin.

C. Ruang Lingkup Program Desa Prima

Ruang lingkup program Desa Prima yaitu:

1. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pada Desa PRIMA, khususnya bagi kelompok perempuan

miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumber daya manusianya (dari segi kualitasnya yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usahanya.

2. Partisipasi kaum perempuan meliputi keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang akan mereka laksanakan hingga pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan itu sendiri.
3. Akses informasi bagi kelompok perempuan.

D. Tahapan Pembentukan Desa Prima

Beberapa tahapan pembentukan Desa Prima sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
Pada tahapan ini dilakukan telaah situasi dan kondisi, memproses usulan calon Desa PRIMA secara berjenjang dan membuat perencanaan pelaksanaan,
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, perbankan, Pemerintah pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, tahapan sosialisasi sebagai berikut:

- DP3AP2 DIY mengirimkan undangan sosialisasi dan pembentukan Desa PRIMA kepada calon anggota dan undangan lain melalui OPD yang membidangi PPPA Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - Materi sosialisasi antara lain: Kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan, model Desa Prima, sinergitas antar sektor dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
- b. Pembentukan Desa Prima, pada tahapan ini dilakukan pembentukan Desa Prima dan memilih nama serta membentuk pengurus Desa Prima. Tahapan inisiasi Pembentukan Desa Prima, sebagai berikut:
 - Pembentukan Desa Prima diinisiasi oleh DP3AP2 DIY.
 - DP3AP2 DIY mengirim pemberitahuan kepada OPD terkait yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa Prima dan pemilihan Desa/Kelurahan yang diusulkan untuk menjadi Calon Desa Prima.
- Calon Desa Prima dipilih dengan pertimbangan (mendasarkan pada data BPS), yaitu memiliki penduduk dalam kategori Miskin atau Rentan Miskin.
 - OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten/Kota mengirimkan calon Desa Prima kepada DP3AP2 DIY.
 - DP3AP2 DIY melakukan seleksi Desa Prima dan melakukan perencanaan inisiasi pembentukan Desa Prima berdasarkan usulan calon Desa Prima.
 - DP3AP2 DIY mengundang OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten/Kota dan calon Desa Prima terpilih untuk berkoordinasi dan berkomitmen pembentukan dan pendampingan Desa Prima.

3. Tahapan Pengendalian

Pada tahapan ini dilakukan pelaporan perkembangan Desa Prima dan pelaporan pengelolaan bantuan penguatan kelembagaan secara periodik dan dilakukan Monitoring dan Evaluasi dengan memantau perkembangan kegiatan, pengelolaan bantuan, dan memberikan masukan serta solusi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Desa Prima.

- a. Klasifikasi Desa Prima merupakan indikator keberhasilan program Desa Prima. Klasifikasi ini mendasarkan pada pertumbuhan jumlah anggota, pertumbuhan jumlah dana bergulir serta perkembangan skala usaha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Klasifikasi	Anggota	Dana Bergulir	Usaha
Tumbuh	25	-	Embriolik – Mikro
Berkembang	Bertambah	Bertambah	Embriolik – Mikro
Maju	Bertambah	Bertambah	Mikro

Tabel 1. Klasifikasi Desa Prima

- b. Monitoring Keanggotaan & Dana Bergulir, dengan cara:
- Monitoring terkait pertumbuhan keanggotaan Desa Prima meliputi: jumlah anggota, dan jumlah anggota yang memiliki usaha.
 - Monitoring terkait pertumbuhan dana bergulir meliputi: Nilai aset dana bergulir, dan jumlah dana yang digulirkan,

c. Monitoring Perkembangan Usaha
Variabel yang harus dimonitor terkait perkembangan usaha anggota meliputi:

- Aspek produksi: Kapasitas produksi dan Efisiensi produksi.
- Aspek pemasaran: Omset dan Jangkauan pemasaran.
- Aspek SDM: Gaji, dan Jumlah Karyawan
- Aspek keuangan: Aset, Utang, Laba dan Modal.

d. Pelaporan

- Alur Pelaporan Desa Prima
- Pelaporan Dana Hibah Penguatan Kelembagaan, terdiri dari:
- Laporan Penggunaan Hibah Penguatan Kelembagaan kepada Gubernur melalui DP3AP2 DIY, dengan format laporan terlampir. Isi laporan meliputi: Laporan Penggunaan Hibah Penguatan Kelembagaan, Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah Penguatan Kelembagaan yang telah digunakan sesuai NPHD/ Proposal, Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui DP3AP2 DIY.

E. Kriteria Menjadi Anggota Desa

Prima

Untuk menjadi anggota Desa Prima Pemerintah Desa/Kelurahan membuat usulan calon anggota dibantu oleh tim penggerak PKK Desa/Kelurahan dan Kepala Seksi Kemasyarakatan. Adapun kriteria calon anggota terdiri atas :

1. Perempuan berusia 18 sampai 60 tahun.
2. Diutamakan perempuan miskin/terancam miskin yang merupakan kepala keluarga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan dengan anggota keluarga ODGJ.
3. Diutamakan mampu membaca dan menulis.

F. Tata Kelola Organisasi

1. Pemilihan Pengurus Dan Nama Desa Prima
 - a. Rapat anggota pertama memilih pengurus dan nama Desa PRIMA.
 - b. Pengurus dan nama Desa PRIMA disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui SK Kepala Desa/Kelurahan.
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan mengirimkan daftar susunan pengurus dan nama Desa PRIMA yang telah disahkan kepada OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kabupaten/Kota dan DP3AP2 DIY sebagai pemberitahuan.

2. Kepengurusan

Pengurus Desa PRIMA dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Susunan pengurus Desa PRIMA terdiri dari: Pelindung, Pembina, Ketua, Sekretaris Bendahara, Ketua Bidang, Panitia Khusus. Pengurus Desa Prima minimal terdiri dari Pelindung, Pembina, 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara. Ketua Bidang dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Contoh: Ketua Bidang Usaha, Ketua Bidang Kerja Sama, dan Ketua Bidang Pengembangan. Panitia Khusus dapat dibentuk apabila pelaksanaan rencana kerja membutuhkan tim khusus sebagai pelaksana.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Prima

4. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Pelindung berfungsi untuk melindungi Desa Prima dalam pelaksanaan kegiatan Desa Prima dan dalam interaksi Desa Prima

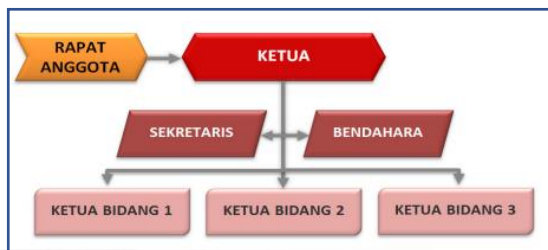
dengan pihak eksternal, Posisi pelindung dipegang Kepala Desa atau Lurah.

- b. Pembina berfungsi sebagai tempat bertanya, berkoordinasi, inisiator program dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Desa Prima, Pembina juga berfungsi sebagai motor penggerak organisasi Desa Prima, Posisi Pembina dipegang oleh ketua TP PKK dan Kepala Seksi yang membidangi kemasyarakatan.
- c. Ketua dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk memimpin jalannya organisasi Desa Prima, Ketua bersama Sekretaris berfungsi sebagai formatur untuk membentuk pengurus Desa Prima secara lengkap, dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran atas nama jajaran pengurus, Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada rapat anggota.
- d. Sekretaris menjalankan tata kelola administrative, melakukan dan mengarsip notulensi dan kegiatan Desa Prima
- e. Bendahara, menjalankan tata kelola keuangan, memverifikasi dan

mengarsip bukti aliran kas masuk dan kas keluar.

- f. Ketua Bidang, Pelaksana inti dan koordinator pelaksana kegiatan Desa Prima sesuai bidangnya masing-masing.
- g. Panitia Khusus, Pelaksana kegiatan kegiatan Desa Prima secara ad interim yang dibentuk sesuai kebutuhan.

5. Alur Komando



Gambar 2. Alur Komando

6. Alur Tanggung Jawab



Gambar 3. Alur Tanggung Jawab

7. Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun, Setiap pengurus maksimal menjabat selama 2 periode berturut-turut, Setelah

2 periode berturut-turut harus diselingi oleh pengurus yang lain.

G. Tata Kelola Administratif

Tata kelola administratif merupakan tugas pokok Sekretaris Desa Prima, Tata kelola administratif berhubungan dengan dokumen internal dan eksternal yang tidak berhubungan dengan keuangan. Dokumen internal adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh Desa Prima yang bersangkutan, sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang diterima oleh Desa PRIMA dari pihak eksternal, Dokumen internal dibuat atas persetujuan ketua dan pembina.

H. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan merupakan tugas pokok Bendahara Desa Prima, Tata kelola keuangan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi bukti dan pencatatan kas, serta pengarsipan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

Kas disimpan oleh bendahara di tempat yang aman (bank), Aliran kas masuk dan kas keluar dicatat dalam buku kas dengan didukung oleh dokumen bukti yang sah, Dokumen keuangan yang telah digunakan sebagai bukti arus kas diarsip, Penerimaan kas dilakukan atas sepengetahuan ketua, Pengeluarkan kas

harus dilakukan melalui permintaan secara tertulis yang mendapat persetujuan Ketua.

I. Rencana Kerja

Rencana kerja disusun setiap tahun oleh Pengurus Desa Prima, Rencana kerja disusun dengan cara menjaring aspirasi anggota, Rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota dengan sepengetahuan Pelindung dan Pembina.

J. Rencana Anggaran

Rencana Anggaran disusun oleh Pengurus Desa Prima berdasarkan rencana kerja, Rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota, Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Desa PRIMA dapat berasal dari: Iuran anggota, Hibah dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, APBDes, Anggaran Kelurahan, Donasi individu, lembaga, Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

K. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disusun oleh pengurus Desa Prima pada akhir masa tugasnya, Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh

ketua Desa Prima kepada rapat anggota, Laporan pertanggungjawaban berisikan pelaksanaan rencana kerja serta realisasi dan efisiensi anggaran, Pemakaian dana yang berasal dari dari pihak eksternal dalam bentuk hibah atau donasi harus lain dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi dana, Laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah dibuat per semester dan disampaikan ke OPD yang membidangi PPPA provinsi dan kabupaten/kota, desa/kelurahan.

L. Profil Desa Prima

Beberapa contoh profil Desa Prima:

1. Desa Prima “Sejahtera”

Di Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, dengan kategori maju yang dibentuk tahun 2013 dengan modal awal dana hibah Rp. 36.000.000,- dan dana yang dikelola sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 87.350.000,- yang mempunyai jumlah anggota 50 (lima puluh) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain kerajinan tangan, bakso goreng, aneka kripik, aneka kue basah dan tempe godhong.



Gambar 4. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Sejahtera”

2. Desa Prima “Gumbregah

Di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kab. Gunungkidul, dengan jumlah KK Miskin sebanyak 744 keluarga, dengan rincian perempuan sejumlah 39 orang, perempuan difabel sejumlah 9 orang, anggota BPD Perempuan 1 orang, perangkat Desa Perempuan 4 orang, Dukuh Perempuan 1 orang, usaha ekonomi perempuan sebanyak 121 usaha, dengan kategori tumbuh yang dibentuk tahun 2019 dengan modal awal

dana hibah Rp. 3.527.000,- dan dana yang dikelola sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 7.561,500,- yang mempunyai jumlah Jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain Dodol kakao, ampyang coklat, kripik pisang, topeng.



Gambar 5. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Gumbregah”

3. Desa Prima “Sejahtera Abadi”

Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo, jumlah KK Miskin 398 keluarga, dengan rincian perempuan 290 orang, perempuan difabel 11 orang, anggota BPD perempuan 3 orang, perangkat Desa perempuan 2 orang, Dukuh Perempuan 1 orang, usaha ekonomi perempuan sebanyak 85 usaha, kategori tumbuh yang dibentuk tahun 2019 dengan modal awal dana hibah Rp. 2.347.000,- dan dana yang dikelola sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 4.337.000,- yang mempunyai jumlah Jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain Gula aren, kripik pegagan, anyaman bambu.



Gambar 6. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Sejahtera Abadi”

4. Desa Prima “Dullor Subur”

Di Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul, Kab. Bantul, dengan jumlah KK Miskin 1077 keluarga, perempuan 571 orang, perempuan difabel 10 orang, anggota BPD Perempuan 1 orang, perangkat Desa Perempuan 5 orang, usaha ekonomi perempuan 350 usaha dengan kategori tumbuh yang dibentuk tahun 2019 dengan modal awal dana hibah Rp. 25.000.000,- dan dana yang dikelola sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 25.987.000,- yang mempunyai jumlah Jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain Usaha boga, anyaman.



Gambar 7. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Dullor Subur”

1. Desa Prima “Srikandi Mataram”

Di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kab. Sleman, dengan profil Desa jumlah KK Miskin sebanyak 1434 keluarga, perempuan 964 orang, anggota BPD perempuan 2 orang, perangkat Desa perempuan 2 orang, Dukuh Perempuan 2 orang, dengan kategori tumbuh yang dibentuk tahun 2019 dengan modal awal dana hibah Rp. 25.000.000,- dan dana yang dikelola sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 26.000.000,- yang mempunyai jumlah Jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain olahan ikan.



Gambar 8. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Srikandi Mataram”

2. Desa Prima “Tunas Bangun Mandiri”

Di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kab. Sleman, dengan profil Desa jumlah KK Miskin 1.161 keluarga, perempuan 595 orang, perempuan difabel 23 orang, anggota BPD perempuan 2 orang, Perangkat Desa perempuan 1 oarang, usaha ekonomi perempuan 306 orang, dengan kategori tumbuh yang dibentuk tahun 2020 yang mempunyai jumlah Jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan jenis usaha unggulan antara lain Usaha boga, kerajinan plastik kresek, anyaman.



Gambar 9. Jenis Usaha Unggulan Desa Prima “Tunas Bangun Mandiri”

Pengembangan Desa Prima dapat berupa:

1. Program Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Program Dinas Teknis Terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota

3. Kerja sama yang tidak mengikat antara Desa Prima dengan pihak ketiga, misalnya program CSR/PKBL, perguruan tinggi melalui program KKN, dan lain-lain.
4. Swadaya, dengan program pengembangan Desa Prima berupa pengembangan tingkat anggota, terutama yang terkait dengan pengembangan bisnis anggota, atau pengembangan tingkat organisasi yang terkait dengan pengembangan kelembagaan, keterampilan organisasi, atau pengembangan bisnis bersama.

M. Pengembangan Individual/Anggota

Pengembangan pada tingkat anggota terkait dengan usaha antara lain:

1. Pelatihan manajemen usaha: kewirausahaan, produksi, pemasaran, keuangan.
2. Pelatihan lain dalam rangka peningkatan kapasitas anggota
3. Pendampingan usaha
4. Skema-skema kerja sama : antar anggota anggota Desa Prima, anggota dengan pihak ketiga, anggota dengan Desa Prima dan Pemerintah, anggota dengan Desa Prima dan BUMDeS, anggota dengan Desa Prima dan pihak ketiga

N. Pengembangan Organisasional

Pengembangan pada tingkat organisasi yang berupa pengembangan skill berorganisasi maupun pengembangan usaha kelompok, terdiri dari:

1. Pengembangan manajerial: manajemen kelompok, pencatatan keuangan kelompok.
2. Pengembangan usaha bersama: koperasi, usaha kelompok.
3. Pendampingan desa PRIMA
4. Skema-skema kerja sama: antar Desa Prima dengan Desa Prima dan Pemerintah, antara Desa Prima dengan BUMDes atau dengan Desa Prima dan pihak ketiga.

Desa Prima mempunyai beberapa kegiatan rutin, antara lain:

1. Pelatihan Keterampilan Desa Prima



Gambar 10. Pelatihan Keterampilan Desa Prima

2. Publikasi Melalui Media



Gambar 11. Publikasi Melalui Media

3. Pameran Indocraft



Gambar 12. Pameran Indocraft Desa Prima

O. Peran Stakeholders

Pembentukan dan pengembangan Desa Prima tak lepas dari peran para stakeholders. Demi optimalnya pengembangan Desa Prima, alangkah baiknya jika setiap stakeholder

menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi, antara lain:

1. DP3AP2 DIY, OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten/Kota
2. SKPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota
3. Lembaga Pemerintah Non Dinas, misalnya Badan Metrologi, BPOM, MUI, LIPI
4. Pemerintah Kecamatan
5. Pemerintah Desa/Kelurahan
6. BUMDes
7. PKBL/CSR BUMN/Swasta
8. Perguruan Tinggi
9. Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya Business Development Services (BDS), YLKI
10. Pendamping Desa Prima
11. Masyarakat Para stakeholders dapat memiliki peran baik yang terkait dengan usaha anggota atau usaha bersama maupun yang terkait dengan organisasi Desa Prima.

P. Peran Terkait Usaha

1. Regulasi (Pemerintah Desa/Kelurahan) melalui Pengendalian tingkat persaingan melalui pembatasan jenis dan jumlah usaha, Pengaturan jenis usaha, Pengaturan jumlah usaha.

2. Fasilitasi dengan membantu, memfasilitasi, memberikan stimulan atau terlibat secara langsung dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Prima meliputi: Fasilitasi infrastruktur fisik/non-fisik (Pemerintah Desa/Kelurahan, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten Kota, LIPI, PT), Fasilitasi legalitas (Pendamping, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD Kabupaten/Kota), Fasilitasi permodalan dan pembiayaan (SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, CSR/PKBL), Fasilitasi pemasaran (SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, CSR/ PKBL, BUMDes)¹⁵ Buku Pedoman Desa Prima DP3AP2 DIY, Fasilitasi pengembangan jejaring (Pemerintah Desa/Kelurahan, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, CSR/PKBL, BUMDes), Fasilitasi kerja sama (Pemerintah Desa/Kelurahan, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, CSR/PKBL, BUMDes), Fasilitasi sengketa usaha (Pemerintah Desa).
3. Pembinaan, fungsi capacity building, yaitu pengembangan soft skill dan hard skill, baik skill berorganisasi maupun kewirausahaan. antara lain melalui Pengembangan skill organisasi

(SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, CSR/PKBL, Pendamping Desa Prima), Pengembangan usaha (Pendampingan Usaha, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, CSR/PKBL, BUMDes), Pengembangan kewirausahaan (Pendampingan Usaha, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, CSR/PKBL).

4. Pengawasan, Fungsi pengawasan, pengendalian dan mediasi melalui Pengawasan persaingan (Pendamping, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat), Pengawasan dampak lingkungan (Pendamping, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat).

Q. Peran Terkait Desa Prima

1. DP3AP2 DIY

- Inisiasi: mengundang, sosialisasi, dan seleksi calon anggota
- Pembentukan: memandu pembentukan Desa Prima, pengesahan Desa Prima melalui SK Gubernur
- Pengembangan: terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui program pengembangan dan pemberian dana insentif

2. OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten/Kota

- Inisiasi: Memilih lokasi Desa/Kelurahan yang diusulkan menjadi Desa Prima
- Pengembangan: terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui program pengembangan dan pemberian dana insentif

3. SKPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota

- Pengembangan: terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui program pengembangan ataupun atas permintaan/ undangan dari Desa Prima

4. Lembaga Pemerintah Non Dinas

- Pengembangan: terlibat dalam pengembangan Desa PRIMA atas permintaan dari Desa PRIMA, misalnya LIPI melalui diseminasi teknologi tepat guna, BPOM melakukan pembinaan terkait bahan kimia berbahaya, Badan Metrologi terkait dengan peneraan, dan sebagainya.

5. Pemerintah Kecamatan

- Pengembangan: terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa

Prima khususnya terkait dengan legalitas usaha

6. Pemerintah Desa/Kelurahan

- Inisiasi: menjadi tuan rumah sosialisasi Desa Prima, mengusulkan calon anggota Desa Prima
- Pembentukan: menjadi tuan rumah pembentukan Desa Prima, mengesahkan pengurus, fasilitasi kantor/sekretariat/papan nama Desa Prima.

- Pengembangan: merupakan motor penggerak pengembangan Desa PRIMA bersama dengan DP3AP2 DIY.

7. BUMDes

- Pengembangan: terlibat secara langsung dalam pengembangan Desa PRIMA khususnya berkaitan dengan usaha bersama

8. CSR/PKBL

- Pengembangan: terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui permintaan/ undangan dari Desa Prima, DP3AP2 DIY, atau OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak
kabupaten/kota.

9. Perguruan Tinggi

- Pengembangan: berperan secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui diseminasi teknologi tepat guna, penerjunan KKN tematik dan non tematik.

10. Lembaga Swadaya Masyarakat

- Pengembangan: berperan secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui berbagai program pembinaan, pendampingan usaha, pengembangan jejaring khususnya terkait lembaga funding untuk mengaitkan program-program lembaga funding dengan Desa Prima.

11. Pendamping Desa Prima

- Pembentukan: turut serta memandu pembentukan Desa Prima
- Pengembangan: berperan sebagai konsultan dalam pengembangan organisasi maupun usaha bersama serta dalam Monev Desa Prima.

12. Masyarakat

Warga masyarakat lebih diperankan dalam fungsi pengawasan,

khususnya terkait dengan dampak lingkungan, Masyarakat juga dapat diberdayakan untuk berperan dalam memberi kan feedback terkait dengan pengembangan Desa Prima maupun usaha anggota melalui berbagai forum.

R. Kesimpulan

Usaha penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk upaya mengekang pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan sebagai prioritas utama pengembangan Kawasan Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan akan mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan, kemudian kesehatan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya mobilitas dan mobilitas pada tingkat kegiatan ekonomi dan produktivitas. Karena terbatasnya biaya pendidikan, rendahnya tingkat aktivitas ekonomi dan produktivitas menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Kualifikasi akademik yang rendah dapat menyebabkan kecenderungan kekerasan. Semua ini adalah masalah terkait seras yang dapat menyebabkan cacat permanen dan keterlambatan perkembangan. Dalam proses pemutusan siklus kemiskinan, salah satu upaya difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan

produktivitasnya, karena secara budaya, perempuan berperan penting dalam keluarga dan masyarakat. Partisipasi perempuan bukanlah beban atau penghambat pembangunan, melainkan salah satu potensi dan aset pembangunan. Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Salah satu usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui DP3AP2 DIY agar dapat menanggulangi kemiskinan adalah dengan pengoptimalan melalui Program Desa Prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (2019), *Buku Pedoman Desa Prima*
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021), *Data Kejadian Bencana Alam*
- Puspitasari (2012), *Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
- Kusumasari & Suyatna (2015), *Peningkatan Kapabilitas Pemasaran Pascabencana Bagi Perempuan Hunian Tetap Pager Jurang, Sleman, Yogyakarta*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 No 1, Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada
- Rahmat (2015), *Pembangunan Alternatif Pasca Bencana Merapi Yogya*
- Cahyadi (2019), *Bencana, Perlindungan Sosial, Dan Perempuan: Studi Kasus Pasca Erupsi Merapi Di Yogyakarta*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Vol 8, No 1
- Sholichah & Paidjala (2017), *Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Tuban*, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Riswan & Arifika (2012), *Perempuan Dan Bencana: Memberdayakan Potensi Sosial Dan Ekonomi Perempuan Korban Banjir Lahar Dingin Merapi*, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2